

DAFTAR PUSTAKA

- Alwafi, Fachrizi dan Rizal Hari Magnadi, 2016, “Pengaruh Persepsi Keamanan, Kemudahan Berinteraksi, Kepercayaan Terhadap Toko dan Pengalaman Berbelanja Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Situs Jual Beli Tokopedia.com”, *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5, No. 2.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Ante, Susanti, 2013, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2.
- Hasanah, Sovia, 2017, “Arti Persidangan Terbuka untuk Umum”, *Hukumonline.com*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum>, diunduh pada 24 Januari 2021.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Internet, 25 Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan*, <https://fakum.untad.ac.id/perbedaan-peradilan-dan-pengadilan/>, diunduh pada 24 Januari 2021.
- Internet, 16 Mei 2021, Pengadilan Negeri Sleman, <http://pn-sleman.go.id/new//>.
- Ipakit, Ronaldo, 2015, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses pada 2 Februari 2021.
- Luntungan, Geraldo Angelo, 2018, “Surat sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 5.
- Maharani, Novita, 2017, *Urgensi Pengaturan Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cybercrime)*, Universitas Brawijaya.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Maulana, Shabur Miftah, Heru Susilo dan Riyadi, 2015, “Implmentasi *E-Commerce* sebagai Media Penjualan *Online*”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1.
- Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, 2013, “Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana”, *Hukumoline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana/>, diunduh pada 23 Desember 2020.
- Raco, J. R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I (Cetakan Ke II)*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Sugiarto, Eko, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.
- Sumenge, Melisa Monica, 2013, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4.
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto, Suryono dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Hukum Acara Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Unnisula.

Teguh Arifiyadi, 2019, “Cara Penyidik Melacak Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online”, *Hukumonline.com*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f814bf6c2ca4/cara-penyidik-melacak-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-ionline-i>, diunduh pada tanggal 5 April 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Wijayanto, Tri, 2015, *Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Perenada Media Group.